

**KESIMPULAN**  
**RAPAT KOORDINASI BIDANG LATTAS TAHUN 2018**  
**DITJEN BINALATTAS**  
**10 OKTOBER 2018**

Pada kesempatan kali ini ijin saya membacakan kesimpulan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas tahun 2018 yang telah kita laksanakan sejak tanggal 09 dan 10 Oktober 2018 di Aston Hotel and Convention Center, Denpasar Bali, yang diantaranya sebagai berikut:

**A. PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS**

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan 2018 dan dalam rangka persiapan penyusunan Pagu Alokasi TA. 2019 hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Penerapan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi agar mengacu SKKNI yang sudah ada, sehingga nama program yang di laksanakan di BLK akan sama.
2. Target dan Lokasi pelatihan tahun 2019 di BLK UPTD agar mengacu hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun 2018, ini dilakukan agar pelaksanaan pada tahun 2019 tidak mengalami hambatan, sehingga target pelatihan di BLK UPTD dan UPTD yang di rencanakan pada tahun 2019 sebesar 215.344 orang (hasil rakortek Surabaya) dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2019.
3. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di LPKS, BLKLN, dan BLK Komunitas dengan total 62.000 orang pada tahun 2019 akan ditetapkan struktur komponen pelatihannya baik jumlah orang per pakatnya maupun target untuk LPKS, BLKLN dan BLK Komunitas;
4. Segera melakukan penyesuaian target PBK dan Pelaksanaan Sertifikasi dengan adanya 2 (dua) BLK UPTD baru yaitu BLK Sidoarjo dan BLK Banyuwangi, selain itu serta perubahan beberapa BLK UPTD Binaan di UPTD;
5. Program Pelatihan dan skema sertifikasi pada tahun 2019 untuk diterapkan oleh BLK baik BLK UPTD, UPTD maupun pelatihan di LPKS/BLKLN/BLK Komunitas. Hasil Rakortek di Surabaya bahwa target pelatihan pada tahun 2019 sebanyak 277.344 orang yang diakhiri dengan sertifikasi sebanyak 170.210 orang.

**B. PENINGKATAN KOMPETENSI INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN**

Mengenai peraturan Menaker Nomor 2 tahun 2018 terkait kelebihan jam mengajar yang perlu disampaikan adalah:

1. Pada tahun 2018, Direktorat Bina Intala masih menunggu hasil konsultasi dan koordinasi terkait implementasi Peraturan ini kepada Inspektorat mengingat di UPTD masih dibayarkan honor bagi Instruktur;
2. Sedangkan untuk tahun 2019, kelebihan jam mengajar disusun sesuai ketersediaan anggaran, dan maksimal adalah 40% dari total Jam Pelatihan yang diajar;
3. Pada tahun 2019, sesuai pagu anggaran 2019 target pelatihan Instruktur dan Tenaga Pelatihan termasuk Dikdas, Upgrading dan Bimtek bagi Intala sebanyak 8.745 orang;
4. Target pelatihan khususnya pelatihan Pelatih Ditempat kerja sebanyak 2.000 orang untuk disesuaikan dengan sektor apa yang akan menyelenggarakan program pemagangan, data dinas provinsi yang akan menyelenggarakan program pemagangan menjadi sangat penting pada tahun 2018.

**C. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PELATIHAN KERJA**

1. Pada tahun 2018 sedang dibangun 75 BLK Komunitas baru, dan diharapkan tahun 2019 akan melaksanakan pelatihan PBK sama dengan 50 BLK Komunitas sebelumnya;

2. Himbauan kepada seluruh satker baik BLK UPTP / UPTD / BLK Komunitas maupun LPKS untuk segera menindaklanjuti surat permohonan kami sebelumnya perihal updating data kelembagaan pada sistem informasi Ditjen Binalattas yaitu : <http://kelembagaan.kemnaker.go.id>;
3. Sedangkan di tahun 2019, sesuai arahan Presiden RI, bahwa Ditjen Binalattas akan memberi bantuan Gedung dan peralatan pelatihan serta pelaksanaan pelatihan bagi 1000 BLK Komunitas baru;
4. Mendorong agar terbentuknya Komite Akreditasi di Provinsi Papua Barat;
5. Target Skill Development Center (SDC) sebanyak 20 Lokasi.

#### D. PENINGKATAN PROGRAM PEMAGANGAN

1. Program pemagangan akan diterapkan berdasarkan jabatan yang ada di 5 sektor yang sudah ada, dan apabila dinas ada jabatan dan sektor nya belum ada agar di usulkan segera, hal mengacu pada pelaksanaan program pelatihan pada tahun 2018;
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan promosi tentang program pemagangan di seluruh sektor di 34 Provinsi, hal ini diperlukan karena masih belum semua sektor memahami tentang program pemagangan dan pelaksanaannya, karena program pemagangan ditetapkan berdasarkan jabatan ( sesuai permenaker 36 tahun 2016);
3. Dinas Provinsi diharapkan melakukan monitoring dan pendataan lulusan peserta pelatihan Pemagangan Dalam Negeri baik berdasarkan anggaran maupun mandiri oleh perusahaan di seluruh kab/kota ;
4. Persiapan Pagu Alokasi tahun anggaran 2019, diharapkan Dinas Provinsi mendorong kegiatan pemagangan Mandiri dikarenakan target Pemagangan Mandiri pada Program PKTKP sebanyak 200.000 orang, sedangkan program pemagangan Dalam Negeri sebanyak 10.000 orang;

#### E. PELATIHAN BIDANG PRODUKTIVITAS DAN CALON WIRAUUSAHA

1. Perlu ada standard yang sama terkait penyelenggaraan pelatihan bidang produktivitas dan calon wirausaha baik di pusat maupun di daerah baik program dan target pesertanya;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas baik pemerintah pusat dan daerah dengan melakukan pendataan jumlah instruktur dan lembaganya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
4. Sedangkan untuk tahun 2019, target Pelatihan peningkatan Produktivitas sebanyak 19.925 orang, dan Pelatihan Calon wirausaha baru sebanyak 18.800 orang;

#### F. PELAKSANAAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA

1. Pelaksanaan sertifikasi lulusan BLK 170.210 orang, Instruktur Pelatihan 4.757 orang, Sertifikasi Pemagangan 210.000 orang, Sertifikasi CPMI 10.000 orang, Sertifikasi Tenaga Kerja 131.202 orang;
2. Peta LSP 1, LPS 2 dan LSP 3 disemua sektor menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi pada tahun 2019;
3. LSP 2 yang ada di BLK agar mengusulkan segera peserta pelatihan assessornya pada tahun 2019 hal dibutuhkan agar pelaksanaan sertifikasi yang ada di LSP 2 BLK UPTP maupun BLK UPTD wilayah kerjanya tidak mengalami hambatan;
4. Mendorong LSP P1 di Industri dalam rangka mempersiapkan percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pelatihan pemagangan

#### G. KESEKRETARIATAN SELURUH SATKER PELAKSANA PROGRAM PKTKP

1. Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP) Tahun 2018 masih dibawah 60% (enam puluh persen) dengan sisa waktu kurang lebih 2,5 bulan lagi, maka diharapkan seluruh satuan kerja pelaksana Program PKTKP Tahun 2018 agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga target tahun 2018 yang telah sepakati dapat dicapai;
2. Satuan kerja yang belum mengirimkan / meng-entry laporan bulanan, laporan triwulanan agar segera mengirimkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya, dan tanggal 10 untuk setiap bulan ke-4, ke-7, ke- 10;

3. Selain itu kepada seluruh Dinas Provinsi Bidang Ketenagakerjaan agar segera menindaklanjuti surat Keputusan Dirjen Binalattas Nomor KEP.46/LATTAS/I/2018 Perihal Pedoman Pengumpulan Data Bidang Pelatihan dan Produktivitas, dimana diharapkan seluruh Dinas mengumpulkan data secara periodik paling lambat tanggal 10 setiap bulannya melalui email para penanggungjawab kegiatan Program PKTKP (Seluruh Direktorat dan Setditjen serta Sekretariat BNSP);
4. Penanggungjawab kegiatan / Direktorat dan Sekretariat untuk terus memonitor capaian setiap satuan kerja dan sekaligus mengevaluasi kegiatan tahun 2018 serta Sehubungan dengan persiapan penyusunan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2019 maka perlu mencermati kembali dokumen perencanaan tahun 2019 yang telah disusun sampai dengan Pagu Anggaran tahun 2019 berdasarkan data evaluasi tahun 2108;
5. Pemerintah Pusat baik Direktorat/Sekretariat/UPTP akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan Provinsi/Kab/Kota untuk meningkatkan capaian Program PKTKP.

Demikian kesimpulan rapat koordinasi bidang pelatihan dan produktivitas tahun 2018 ini disampaikan, semoga dapat segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan tahun anggaran 2018 dan perencanaan tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dirjen Binalattas untuk memberikan arahan dan sekaligus menutup acara Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas TA. 2018 secara resmi.

Demikian atas perhatian bapak/Ibu sekalian diucapkan terimakasih.